

**KAJIAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI
UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
SERAN KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Ratna Putri Supravita¹, Muhammad Imran²

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Cordova

ratnaputrisupravita92@gmail.com, ustadimron83@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menjawab apakah program pemberdayaan masyarakat yang menjadi program Pemerintah Desa Seran mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Selain itu, artikel ini bertujuan untuk menjawab apa saja faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di desa Seran? Guna menjawab rumusan masalah tersebut, artikel ini menggunakan konsep Pemerintah, Kesejahteraan, Pemberdayaan, dan Pembangunan sebagai landasan teori. Artikel ini juga menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan adalah dengan menggabungkan sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Program pemberdayaan masyarakat merupakan program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. (2) Pemerintah Desa Seran melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan tetap melibatkan masyarakat. (3) Melalui program-program pemberdayaan masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Seran. (4) Faktor pendukung program pemberdayaan masyarakat desa Seran antara lain yaitu beberapa faktor pendukung program pemberdayaan di desa Seran diantaranya: (a) Anggaran yang cukup. (b) Kekompakan masyarakat. (c) adanya regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan program pemberdayaan. (5) Faktor penghambat program pemberdayaan masyarakat desa seran antara lain yaitu Belum optimalnya kegiatan pemberian penjelasan dan petunjuk pada masyarakat, Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, Kurangnya kerja sama yang dilakukan dengan berbagai pihak, Belum optimalnya fasilitasi bagi masyarakat untuk memperoleh modal usaha, Belum memadainya pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat.

Kata Kunci: Program Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Desa Seran

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi ruang bagi pemerintah desa untuk mempraktikkan paradigma baru dalam pembangunan desa di Indonesia. Untuk mengimplentasikan hal tersebut diperlukan upaya agar desa mempunyai kemampuan sendiri dalam membangun dan mengembangkan potensi desa yang ada. Paradigma pembangunan yang dilakukan sendiri oleh Desa dikenal dengan istilah “Desa Membangun”. Konsep Desa Membangun sudah dipraktikkan oleh desa yang mempunyai *agent of change* (AC) terutama pada struktur pemerintah desa. Hal ini karena agent of change dapat langsung memberikan gagasan ataupun arahan bagi pembangunan desa. Berkaca dari hal tersebut diperlukan stakeholder lain yang dapat juga berfungsi sebagai AC. Oleh karena itu diperlukan upaya pengembangan masyarakat untuk memunculkan keberdayaan desa dalam usaha peningkatan kualitas hidup peningkatan ekonomi masyarakatnya. Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak hanya bertumpu pada pemerintah tetapi juga stakeholder lain seperti *Non Government Organization* (NGO), Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat desa.

Program pemberdayaan masyarakat tidak hanya dikonsentrasikan di perkotaan saja, tapi juga di perdesaan. Bahkan, Pemerintah Pusat menitikberatkan penanggulangan kemiskinan di masing-masing departemen dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sebagai payung dari program-program pemberdayaan.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan itu sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut (Sumodiningrat, Gunawan, 2002); pertama, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. model ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan keinginan dan mengenali kemampuan serta

kebutuhan masyarakat. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat terutama pada masyarakat pedesaan. Seringkali kita melihat bahwa masing-masing desa memiliki program pemberdayaan yang berbeda-beda namun memiliki tujuan yang sama. Persoalan kemiskinan tentu menjadi problem yang harus diselesaikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pada pemerintah tingkat desa.

Pengentasan kemiskinan masih menjadi hal yang sangat diprioritaskan diseluruh negara. Desa merupakan daerah atau wilayah yang rentan terhadap kemiskinan dan kesejahteraan. Tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kesejahteraan di Desa, tentu menjadi catatan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk dapat segera diselesaikan. Berbagai program dan kebijakan yang telah dibuat dan dijalankan nyatanya masih harus dievaluasi dengan baik karena belum dapat bekerja secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan. Terbukti dengan masih banyaknya pengangguran di berbagai daerah terutama di Desa-Desa.

Minimnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu faktor meningkatnya pengangguran terutama bagi masyarakat Desa yang tidak memiliki pendidikan yang memadai sehingga tidak mampu bersaing dengan masyarakat lainnya yang memiliki pendidikan tinggi. Hingga saat ini, tingkat kesejahteraan yang belum memadai baik secara materil maupun spiritual, banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang salah satunya adalah pendidikan yang rendah, sehingga menyebabkan kemiskinan, ketertinggalan, dan keterpurukan terus terjadi. Oleh karena itu, dengan besarnya anggaran yang dikucurkan kepada pemerintah desa, diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desanya. Dengan berbagai program yang telah dibuat sesuai dengan potensi desa tersebut diharapkan dapat diaplikasikan dengan baik dan tepat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Desa Seran merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan wilayah pedesaan. Beberapa tahun terakhir ini desa seran sedang mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa berupa pertanian bawang merah.

Berdasarkan uraian diatas, artikel ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah program pemberdayaan masyarakat yang menjadi program pemerintah desa seran mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. (2) Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di desa Seran.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek peneliti seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J. Moleong, 2018). Dengan demikian, metode ini dapat memberikan pemahaman mendalam, menyeluruh, rinci, serta dapat memberikan penjelasan secara luas tentang persoalan yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Upaya meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan. Banyak cara yang dilakukan dalam memacu pembangunan, salah satunya dilakukan dengan melakukan pengembangan sumberdaya manusia baik sebagai pelaku maupun objek dari pembangunan tersebut yang selalu kita dengar dengan istilah pemberdayaan masyarakat.

Program pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, Pendekatan utama dalam konsep

pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut (Sumodiningrat, 2002): pertama, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan.

Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendirisendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat, sehingga perubahan struktural yang terjadi diharapkan merupakan proses yang berlangsung secara alami.

Pemerintahan desa seran menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah desa seran antara lain:

1. Pemberian bantuan alat pertanian
2. Pemberian alat pertukangan
3. Pemberian alat pembuatan kue
4. pemberian bibit cabe untuk program hultikultura
5. Program pertanian bawang merah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa (Bapak Abdul Manan) mengatakan bahwa: *“Semua program pemberdayaan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karna dalam program pemberdayaan selalu melibatkan masyarakat”*. Melibatkan masyarakat dalam program pemberdayaan merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat mandiri dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang dilansir melalui situs resminya bahwa ada beberapa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu: Pengembangan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Meciptakan program untuk mewujudkan sebuah desa dengan masyarakat yang sadar tentang kesehatan, gizi, pola hidup sehat, dan bersih baik jasmani dan rohani. Menata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, taat hukum, dan harmonis. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasakan nilai luhur budaya lokal.

Demikian juga, menurut salah seorang warga yang terlibat langsung dalam program pemberdayaan yaitu Hj. Darmiati mengatakan bahwa: *“Saya sangat bersyukur dengan adanya program pemberdayaan dari pemerintah desa seran, kami merasakan keuntungan dari adanya program tersebut, ekonomi pun meningkat, setidaknya kami dapat menikmati uang harian setiap hari.”*

Faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di Desa Seran

Dalam menjalankan sebuah program tentunya tidak bisa terlepas dari factor pendukung maupun penghambat dalam meraih keberhasilan yang diharapkan, namun demikian, factor-faktor tersebut bukanlah sebuah halangan dalam menjalankan sebuah program. Pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang tidak terlepas dari berbagai hambatan yang menyertainya. Hambatan yang sering muncul adalah sulitnya untuk mensinergiskan berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program yang terpadu. Dengan memusatkan pada satu dimensi, pengembangan akan mengabaikan kekayaan dan kompleksitas kehidupan manusia dan pengalaman masyarakat. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa berbagai tindakan untuk memberdayakan masyarakat tidak bisa disinergiskan. Pengertian terpadu tidak berarti semua jenis kegiatan pemberdayaan dilakukan secara serentak.

Pengembangan masyarakat secara terpadu dapat digambarkan sebagai serangkaian kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara sistematis dan saling melengkapi. Pemberdayaan bukanlah program yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu singkat atau bersifat temporer. Pemberdayaan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan terus mengembangkan jenis-jenis kegiatan yang paling tepat untuk komunitas. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan dapat berasal dari kepribadian individu dalam komunitas dan bisa juga berasal dari sistem sosial. Kendala-kendala tersebut adalah:

1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat luar

Masyarakat yang kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar dapat menyebabkan kurangnya memnadapat informasi tentang perkembangan dunia. Hal ini mengakibatkan masyarakat tersebut terasing dan tetap terkurung dalam pola-pola pemikiran yang sempit dan lama. Selain itu mereka cenderung tetap mempertahankan tradisi yang tidak mendorong kearah kemajuan.

2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi yang terlambat

Jika suatu masyarakat kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat tersebut menjadi lambat. Hal ini disebabkan mereka kurang atau belum menerima informasi tentang kemajuan masyarakat lain. Disamping itu penjajahan juga dapat menyebabkan terlambatnya perkembangan IPTEK pada suatu masyarakat.

3. Sikap masyarakat yang tradisional

Masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan menganggap tradisi tak dapat diubah secara mutlak, dapat mengakibatkan terhambatnya perubahan sosial dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan masyarakat tak bersedia menerima inovasi dari luar. Padahal, inovasi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan yang diharapkan dalam suatu masyarakat.

4. Prasangka terhadap Hal-hal yang baru atau asing

Rasa curiga terhadap hal-hal baru yang datang dari luar dapat menghambat terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Sikap ini bisa dijumpai dalam masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Mereka tak bisa melupakan pengalaman-pengalaman pahit selama masa penjajahan. Akibatnya,

semua unsur-unsur baru yang berasal dari bangsa barat selalu dicurigai dan sulit mereka terima.

5. Adat atau kebiasaan

Adat dan kebiasaan juga dapat menghambat terjadinya perubahan dalam masyarakat. Unsur-unsur baru dianggap oleh sebagian masyarakat dapat merusak adat atau kebiasaan yang telah mereka anut sejak lama. Mereka khawatir adat atau kebiasaan yang dianut menjadi punah jika mereka menerima unsur-unsur baru bahkan dapat merusak tatanan atau kelembagaan sosial yang mereka bangun dalam masyarakatnya.

6. Ketergantungan (*depedence*).

Ketergantungan suatu komunitas terhadap orang lain (misalnya terhadap pendamping sosial) menyebabkan proses “pemandirian” masyarakat membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama.

7. Superego

Superego yang terlalu kuat dalam diri seseorang cenderung membuat ia tidak mau atau sulit menerima perubahan atau pembaharuan. Dorongan superego yang berlebihan dapat menimbulkan kepatuhan yang berlebihan pula.

8. Rasa tidak percaya diri (*self-distrust*)

Rasa tidak percaya diri membuat seseorang tidak yakin dengan kemampuannya sehingga sulit untuk menggali dan memunculkan potensi yang ada pada dirinya. Hal ini membuat orang menjadi sulit berkembang karena ia sendiri tidak mau berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

9. Rasa tidak aman dan regresi (*insecurity and regression*)

Keberhasilan dan “masa-masa kejayaan” yang pernah dialami seseorang cenderung menyebabkan ia larut dalam “kenangan” terhadap keberhasilan tersebut dan tidak berani atau tidak mau melakukan perubahan. Contoh regresi ini adalah: seseorang yang tidak mau mengubah pola pertaniannya karena ia pernah mengalami masa-masa panen yang melimpah di waktu yang lalu. Rasa tidak aman berkaitan dengan keengganan seseorang untuk melakukan tindakan perubahan atau pembaharuan karena ia hidup dalam suatu kondisi yang dirasakan tidak membahayakan dan berlangsung dalam waktu cukup. Contoh rasa tidak aman ini antara lain : seseorang tidak berani mengemukakan pendapatnya karena takut salah,

takut malu dan takut dimarahi oleh pimpinan yang mungkin juga menimbulkan konsekuensi ia akan diberhentikan dari pekerjaannya.

10. Kesepakatan terhadap norma tertentu (*conforming to norms*)

Norma berkaitan erat dengan kebiasaan dalam suatu komunitas. Norma merupakan aturan-aturan yang tidak tertulis namun mengikat anggota-anggota komunitas. Di satu sisi, norma dapat mendukung upaya perubahan tetapi di sisi lain norma dapat menjadi penghambat untuk melakukan pembaharuan.

11. Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (*systemic and cultural coherence*)

Perubahan yang dilakukan pada suatu area akan dapat mempengaruhi area yang lain karena dalam suatu komunitas tidak berlaku hanya satu sistem tetapi berbagai sistem yang saling terkait, menyatu dan terpadu sehingga memungkinkan masyarakat itu hidup dalam keadaan mantap. Sebagai contoh, perubahan sistem mata pencaharian dari ladang berpindah menjadi lahan pertanian tetap akan menimbulkan perubahan pada kebiasaan yang lain seperti pola pengasuhan anak, pola konsumsi dan sebagainya.

12. Kelompok kepentingan.

Kelompok kepentingan dapat menjadi salah satu penghambat dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Misalnya, upaya pemberdayaan petani di suatu desa tidak dapat dilaksanakan karena ada kelompok kepentingan tertentu yang bermaksud membeli lahan pertanian untuk mendirikan perusahaan tekstil. Kelompok kepentingan ini akan berupaya lebih dulu agar lahan pertanian tersebut jatuh ke tangan mereka.

13. Hal yang bersifat sakral (*the sacrosanct*).

Beberapa kegiatan tertentu lebih mudah berubah dibandingkan beberapa kegiatan lain, terutama bila kegiatan tersebut tidak berbenturan dengan nilai-nilai yang dianggap sakral oleh komunitas. Sebagai contoh : di banyak wilayah, dukungan terhadap perempuan yang mencalonkan diri sebagai pemimpin dirasakan masih sangat kurang karena masyarakat umumnya masih menganggap bahwa pemimpin adalah laki-laki sebagaimana yang diajarkan oleh agama atau sesuai dengan sistem patriaki.

14. Penolakan terhadap orang luar.

Anggota-anggota komunitas mempunyai sifat yang universal dimiliki oleh manusia. Salah satunya adalah rasa curiga dan “terganggu” terhadap orang asing. Pekerja sosial atau pendamping sosial yang akan memfasilitasi program pemberdayaan tentu akan mengalami kendala dan membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum ia dapat diterima dalam suatu komunitas. Di samping itu, rasa curiga dan terganggu ini menyebabkan komunitas enggan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh “orang asing” yang memfasilitasi program pemberdayaan di daerah mereka.

15. Kritik terhadap pemberian bantuan

Modal fisik terdiri dari dua kelompok, yaitu bangunan dan infrastruktur. Bangunan dapat berupa rumah, gedung perkantoran, toko dan lain-lain. Sedangkan infrastruktur dapat berupa jalan raya, jembatan, jaringan listrik dan telepon dan sebagainya. Modal fisik selalu terkait erat dengan modal manusia. Modal fisik tidak dapat digunakan apabila tidak ada modal manusia yang menggerakkan atau memanfaatkan atau melaksanakan kegiatan di dalamnya. Oleh karena itu, modal fisik sering disebut sebagai pintu masuk (entry point) untuk melakukan perubahan atau pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Seran bahwa ada beberapa factor pendukung program pemberdayaan di desa seran diantaranya:

1. Anggaran yang cukup.
2. Kekompakan masyarakat
3. Adanya regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan program pemberdayaan

Adapun faktor penghambat dalam menjalankan program pemberdayaan di desa seran sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kegiatan pemberian penjelasan dan petunjuk pada masyarakat yang disebabkan oleh kemampuan aparatur pemerintah desa yang belum memadai, keterbatasan waktu yang dimiliki dan juga kemampuan dan kesiapan masyarakat yang masih rendah.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan sumber anggaran untuk

membiayai kegiatan tersebut, belum memadainya SDM perangkat desa dan juga belum memadainya fasilitas pendukung kegiatan serta kurangnya kesediaan masyarakat untuk ikut dalam kegiatan diklat.

3. Kurangnya kerja sama yang dilakukan dengan berbagai pihak yang disebabkan oleh kurangnya pendekatan dengan pihak lain, belum adanya pihak yang bersedia diajak kerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan belum memadainya kemampuan yang dimiliki aparatur pemerintah desa.
4. Belum optimalnya fasilitasi bagi masyarakat untuk memperoleh modal usaha yang disebabkan oleh kurang adanya kerja sama yang terjalin, belum adanya pihak yang mau diajak kerja sama dan belum tercapainya kesepakatan kedua belah pihak.
5. Belum memadainya pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan sumber anggaran yang dimiliki dan juga belum adanya sumber-sumber lain dalam memperoleh bantuan modal usaha serta keterbatasan Pendapatan Asli Desa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam strategi pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan di Desa Seran Kecamatan seteluk Kabupaten Sumbawa Barat antara lain:

1. Memberikan penjelasan dan petunjuk pada masyarakat dengan cara meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa, menyusun ulang agenda kegiatan dan mengajak masyarakat untuk siap sedia mengikuti kegiatan.
2. Mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dengan cara mengalokasikan sumber anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut, meningkatkan kemampuan SDM perangkat desa dan menyediakan serta melengkapi fasilitas pendukung kegiatan serta mengajak masyarakat untuk ikut dalam kegiatan diklat.
3. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dengan cara melakukan komunikasi dan pendekatan secara intens dengan pihak lain, mengajak pihak lain untuk bersedia bekerja sama dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa.

4. Memfasilitasi bagi masyarakat untuk memperoleh modal usaha dengan cara melakukan kerja sama dengan pihak swasta dan perbankan, mencari pihak luar dan mengajak agar bersedia untuk bekerjasama dengan pemerintah desa.
5. Memberikan bantuan modal usaha bagi masyarakat dengan cara mengajukan permohonan penambahan sumber anggaran, mencari sumber-sumber lain untuk meningkatkan penerimaan desa dan melakukan kerja sama dengan pihak perbankan dan swasta.

Menurut Kepala Desa Seran bahwa *“Setiap program pasti ada hambatannya namun jangan sampai kita tidak mau menjalankan program itu, jangan ragu dalam menjalankan program”*.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa seran tidak lepas dari berbagai factor pendukung dan penghambat, namun demikian program tersebut tetap berjalan. Pemerintah desa seran beserta jajaran masyarakat merupakan factor penguat dalam mengembangkan setiap program. Keikutsertaan serta partisipasi masyarakat sangat diharapkan. Pemerintah desa tidak pernah bosan dalam memberikan arahan dan sosialisasi dalam mengembangkan program demi kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program pemberdayaan masyarakat merupakan program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Pemerintah Desa Seran melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan tetapa melibatkab masyarakat.
3. Melalui Program-Program pemberdayaan masayakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa seran.
4. Faktor pendukung program pemberdayaan masyarakat desa seran antara lain yaitu beberapa factor pendukung program pemberdayaan di desa seran diantaranya:
 - a. Anggaran yang cukup.

- b. Kekompakan masyarakat
 - c. Adanya regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan program pemberdayaan
5. Faktor penghambat program pemberdayaan masyarakat desa seran antara lain yaitu Belum optimalnya kegiatan pemberian penjelasan dan petunjuk pada masyarakat, Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, Kurangnya kerja sama yang dilakukan dengan berbagai pihak, Belum optimalnya fasilitasi bagi masyarakat untuk memperoleh modal usaha, Belum memadainya pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat.

REFERENSI

- Asrori. 2014. Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus. (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri)
- Badrudin, Syamsiah. 2011. Managemen Pembangunan Daerah. Lampena Inti Media, Sengkang.
- C.S.T Kansil, Christine. 2004. Pemerintahan Daerah Di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika,)
- HAW.Widjaja. 2007. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Hanif Nurcholis. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta: Penerbit Erlangga)
- Irawan, M. Suparmoko.1987. Ekonomi Pembangunan. (Yogyakarta:Liberty)
- Numan. 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ndraha, Taliziduhu. 2004. Pembangunan Masyarakat; Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Sadu Wastiono, Irwan Tahir. 2007. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: CV. Fokus Media
- Sofyardi dan Helmi. 2013. Ekonomi Kependudukan Konsep, Teori dan Metode Estimasi. Yogyakarta: CV Andi Offset

Sabon, Max Boli. Dr. 2015. Ilmu Negara. Bahan pendidikan untuk perguruan tinggi. Atma Jaya.

Todaro, Michael. P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Siregar, Hermanto dan Dwi Wahyuniarti. 2008. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin.

http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/PROS_2008_MAK3.pdf. (Diakses tanggal 11 Maret 2022)